

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan perubahan yang terencana menuju suatu perbaikan. Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah selalu berbanding lurus dengan apa yang diharapkan, karena segala perubahan terutama pembangunan selalu disertai dengan permasalahan bahkan konflik, khususnya dalam pembangunan Bendungan. Pembangunan bendungan melibatkan aspek lingkungan fisik berupa sumber daya lahan serta aspek sosial berupa sistem kependudukan sehingga memerlukan sistem administrasi berupa proses pembebasan lahan. Pada proses pembebasan lahan terdapat sejumlah permasalahan ataupun pertentangan yang mendorong terjadinya konflik, tentunya konflik tersebut harus disertai dengan upaya penyelesaiannya. Adapun salah satu contoh pembangunan bendungan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado.

Bendungan Jatigede terletak di Kabupaten Sumedang, sumber air bendungan berasal dari aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Bendungan ini disebut-sebut sebagai bendungan terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan Bendungan Jatigede membawa implikasi penting bagi pembangunan nasional khususnya pembangunan regional Jawa Barat. Tujuan utama pembangunan bendungan Jatigede adalah untuk pengendalian banjir dan pengelolaan irigasi guna meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, mengurangi resiko banjir di daerah hilir, serta mendorong perkembangan ekonomi berupa peningkatan pendapatan daerah melalui bidang pariwisata yang mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Pembangunan bendungan memiliki sejumlah tujuan, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), irigasi dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, pengendalian banjir, dan untuk air minum.

Muthi Amila, 2016

**KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN JATIGEDE DI DESA WADO**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembendungan sungai menghasilkan listrik tenaga air dan mengurangi resiko perubahan iklim global (Fan, et.all, 2015).

Pembangunan Bendungan Jatigede mengacu pada kebijakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat No.598.82/SK.1266-Pem.Um/81 tanggal 16 September 1981 tentang penerbitan izin pembebasan tanah dan tata cara pengadaan lahan dan SK Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pekerjaan Umum No.77 Tahun 1984/431/KPTS/1984 tanggal 5 November 1984 tentang pembangunan Bendungan Jatigede. Terdapat perbedaan yang terletak pada penentuan harga ganti rugi dari kedua dasar hukum tersebut, sehingga menimbulkan keresahan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi.

Aktivitas proyek pembangunan bendungan Jatigede belum berjalan secara optimal, karena pada pelaksanaannya sempat terhambat karena dihadapkan oleh beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut muncul akibat permasalahan pembebasan lahan, dimana pemberian uang ganti rugi dan relokasi belum sesuai dan belum merata. Kondisi tersebut menimbulkan beragamnya pendapat penduduk terhadap pembangunan Jatigede, dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra, sehingga meningkatkan gejolak sosial di kalangan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Gejolak sosial tersebut pada akhirnya menimbulkan beragam permasalahan bahkan konflik sosial dalam masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

**Tabel 1.1**

**Data Wilayah dan Penduduk Desa Wado Yang Tergenang**

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Buah Ngariung	457 orang
2	Maleber	434 orang
<b>Luas wilayah yang tergenang</b>		<b>145.62 ha</b>

Sumber: Hasil Data Penelitian Kualitatif (2016)

Desa Wado Kecamatan Wado merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak pembangunan Bendungan Jatigede. Pada pelaksanaan upaya pembebasan lahan di Desa Wado muncul gejolak sosial dalam masyarakat, keberagaman respon dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi upaya pembebasan lahan mendorong terjadinya konflik. Konflik merupakan “suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan” Soekanto (2013, hlm. 35). Konflik-konflik tersebut diantaranya berupa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk aksi demonstrasi pun beragam diantaranya ada yang dengan mengajukan petisi dan surat pernyataan *complain* kepada pihak Desa yang kemudian disampaikan ke pihak pemerintah pusat, kemudian ada yang melakukan aksi unjuk rasa ke sejumlah kantor pemerintah pusat, dan ada pula masyarakat yang memilih bertahan tinggal di permukiman yang merupakan lokasi genangan bendungan.

Pembebasan lahan mengakibatkan peningkatan ketegangan sosial dan ketidakadilan yang mungkin memaksakan timbulnya ancaman jangka panjang untuk stabilitas dan pembangunan berkelanjutan (Qian, 2015). Pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Jatigede telah dilaksanakan sejak tahun 1982. Pembebasan lahan menunjukkan kesenjangan antara pihak mayoritas yang terlibat yakni investor dan masyarakat lokal. Pembebasan lahan menimbulkan permasalahan berupa eksploitasi penduduk yang tingkat pendidikannya rendah, masyarakat lokal dan pemilik tanah yang tidak mampu memahami, mengevaluasi dan menilai implikasi hukum, hak, dan dampak dari upaya pembebasan lahan (Tambang, et.all, 2016).

Berdasarkan pembahasan diatas kondisi perubahan sosial dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya konflik dan pembangunan dapat tergambar secara jelas. Pembangunan dapat memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif berupa adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh respon dan kesiapan masyarakat yang berbeda terhadap adanya pembangunan. Pembangunan bendungan memiliki banyak manfaat, terutama dalam konteks perubahan iklim dan peningkatan permintaan global untuk listrik. Namun juga memiliki dampak

negatif terhadap lingkungan, manusia, dan konsekuensi politik (Brown, et.all, 2009). Dalam upaya pembangunan melibatkan lingkungan yakni sumber daya lahan dan pada pelaksanaannya dibutuhkan sistem administratif yang terencana berupa upaya pembebasan lahan. Namun terdapat permasalahan yang muncul dari upaya pembebasan lahan diantaranya kehilangan lahan, hilangnya mata pencaharian, deskripsi kegiatan ekonomi, konflik terkait tanah yang rumit, dan relokasi ke daerah yang kurang berkembang (Mpogole, et.all, 2011). Hal tersebut dapat terlihat langsung dalam proses pembangunan Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang.

Untuk mengetahui deskripsi proses pembebasan lahan pembangunan Jatigede di Desa Wado, maka dari itulah, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui hal tersebut. Diperlukan adanya upaya analisis mengenai kondisi faktual bagaimana proses pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede, kemudian faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya konflik pembebasan lahan, kemudian dampak apa saja yang muncul dari adanya konflik pembebasan lahan, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menangani berbagai konflik pembebasan lahan serta permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak. Maka dari itu peneliti mengambil dan memilih judul **“KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JATIGEDE DI DESA WADO.”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah pokok penelitian ini, yaitu: “Konflik pembebasan lahan proyek pembangunan bendungan Jatigede Di Desa Wado”

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan sehingga mencapai sasaran berdasarkan tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan inti permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede yang terjadi di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ?

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede yang terjadi Desa Wado Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana dampak konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede yang terjadi di Desa Wado Kabupaten Sumedang ?
4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan umum**

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana konflik pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Jatigede.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede yang terjadi di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede yang terjadi Desa Wado Kabupaten Sumedang.
- c. Untuk mengidentifikasi dampak konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede yang terjadi di Desa Wado Kabupaten Sumedang.
- d. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan bagi pengembangan ilmu sosiologi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang sosiologi pembangunan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

##### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan mengenai konflik pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Jatigede.

##### b. Bagi peneliti dan pembaca

Penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

##### c. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan perencanaan pembangunan nasional agar lebih maksimal.

##### d. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan perencanaan pembangunan regional agar lebih maksimal.

##### e. Bagi Tokoh Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai konflik pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan jatigede.

##### f. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai konflik pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan jatigede.

### **1.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi berisi tentang sistematika penulisan dari setiap bab dan sub-bab yang ada dalam penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang didalamnya terdiri dari beberapa sub-sub bab. Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

#### **BAB I Pendahuluan.**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. Latar belakang masalah memaparkan konteks penelitian yang dilakukan, mengapa peneliti tertarik meneliti permasalahan berdasarkan fakta-fakta, data-data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Dalam identifikasi masalah dan rumusan masalah, peneliti memaparkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan khusus yang menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan. Kemudian manfaat penelitian dilihat dari salah satu aspek atau beberapa aspek yang berhubungan dengan konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede.

#### **BAB II Tinjauan pustaka**

Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumentasi dan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis. Dokumentasi dan data diperoleh dari studi literatur. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menyusun pertanyaan penelitian. Selain itu kajian pustaka digunakan untuk membandingkan mengkontraskan dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang hendak dikaji dan dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede. Konsep dan teori berhubungan dengan konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede. Penelitian terdahulu dan teori yang digunakan yaitu teori Konflik Karl Max dan Ralf Dahrendorf.

### BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai konflik pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Jatigede. Selain itu, dalam Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI (2015, hlm. 28). BAB III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian termasuk beberapa komponen lainnya, yaitu desain penelitian, partisipan, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.

### BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis memuat analisis data untuk menghasilkan temuan data dan pembahasan. Bagian pembahasan dan analisis data mengaitkan dengan dasar teoritik yang telah dibahas sebelumnya. Hasil penelitian berupa informasi dan data yang diperoleh dari lapangan tentang konflik pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Jatigede diantaranya adalah mengenai proses pembebasan lahan, faktor penyebab konflik pembebasan lahan, dampak adanya konflik pembebasan lahan, dan upaya untuk mengatasi konflik pembebasan lahan. Penulis mendeskripsikan secara jelas dan terurai agar hasil akurat dan sesuai dengan fakta.

### BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan simpulan dan rekomendasi. Penulis mencoba memberikan simpulan dan rekomendasi berupa saran sebagai penutup dari penelitian dan permasalahan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi serta dikaji dalam skripsi ini. Saran tersebut akan diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut.